**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan adanya pengaruh globalisasi dan berkembangnya kompetisi, para auditor dituntut untuk bekerja secara profesional dan diharuskan memiliki kemampuan serta keahlian khusus agar mampu bersaing di dunia usaha pada masa sekarang ini dan masa mendatang. Selain itu, dalam menjalankan suatu profesi juga dikenal dengan adanya etika profesi dan etika bisnis.

Etika bisnis merupakan aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan benar untuk beragam institusi, transaksi, teknologi, aktivitas dan usaha yang kita sebut bisnis. Dalam dunia bisnis, setiap pebisnis yang jujur pastilah ingin berbisnis secara etis. Untuk itu, mereka membangun tata kelola yang diperkuat dengan panduan etika bisnis dan kode etik kerja. Etika profesi merupakan salah satu unsur penting dari setiap profesi, tak terkecuali profesi akuntansi. Etika profesi ini merupakan sarana pengaturan diri (*self-regulation*), yang sangat menentukan bagi pelaksanaan profesi sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntansi ditentukan oleh kepatuhan para akuntan terhadap standar etika yang disepakati (Kusmanandji, 2003: 16-1). Apabila seorang auditor melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis, maka hal tersebut akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi auditor itu (Khomsiyah dan Indrianto, 1998).

Akuntan merupakan profesi yang keberadaannya sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat. Sebagai sebuah profesi yang kinerjanya diukur dari profesionalismenya, akuntan harus memiliki keterampilan, pengetahuan, dan karakter. Penguasaan keterampilan dan pengetahuan tidaklah cukup bagi akuntan untuk menjadi profesional. Karakter diri yang dicirikan oleh ada dan tegaknya etika profesi merupakan hal penting yang harus dikuasainya pula (Ludigdo, 2007: 52).

Sesuai dengan posisi profesionalnya, para akuntan bekerja di lingkungan atau dalam konteks organisasi, khususnya bisnis. Agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tuntunan profesionalismenya, seorang akuntan perlu memiliki “kesiapan etis”, sejalan dengan tuntunan profesi, organisasi tempat mereka bekerja, dan utamanya masyarakat yang memberikan kepercayaan kepadanya. Artinya, ketika menjalankan tugas, apa pun bidang spesialisasinya seorang akuntan perlu memiliki kepekaan yang tinggi untuk menyadari, agar mampu mendeteksi adanya isu-isu yang dihadapi oleh klien atau organisasi tempatnya bekerja atau isu-isu etis yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Selanjutnya, seorang akuntan juga mampu menentukan sikap dan memutuskan tindakan yang paling tepat (Kusmanadji, 2003: 3)

Secara historis akuntan dipersiapkan sebagai profesi yang lebih menekankan etika dibanding profesi lain. Akuntan memiliki kewajiban pada organisasi/perusahaan, profesi, publik dan diri mereka sendiri untuk menegakkan standar tertinggi dalam perilaku etis. Mereka memiliki kewajiban agar kompeten dan memelihara kepercayaan, integritas, dan objektivitas. Nilai dan sistem etika mempengaruhi tidak hanya perilaku akuntan, tetapi juga keberhasilan akuntan (Mutmainah dan Asy’ari, 2004).

Akuntan profesional bekerja atau menjalankan profesinya dalam suatu kerangka yang diciptakan untuk bisnis dan organisasi sejenis lainnya dengan berbagai tuntutan etis sejalan dengan harapan masyarakat (Kusmanadji, 2003: 3). Bekerja secara profesional berarti bekerja dengan menggunakan keahlian khusus menurut aturan dan persyaratan profesi. Karena itu setiap pekerjaan yang bersifat profesional memerlukan suatu sarana berupa standar dan kode etik sebagai pedoman atau pegangan bagi seluruh anggota tersebut.

Ketentuan yang mengatur sikap mental dan moral auditor disebut kode etik. Tugiman (1997) mengungkapkan bahwa kode etik diperlukan untuk mengatur tingkah laku individu agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya kode etik, masyarakat akan dapat menilai sejauh mana seorang auditor telah bekerja sesuai dengan standar-standar etika yang telah ditetapkan oleh profesinya (Trisnaningsih, 2007; Sukriah dkk., 2009). Lebih lanjut, kode etik profesi merupakan salah satu upaya dari suatu asosiasi profesi untuk menjaga integritas profesi tersebut agar mampu menghadapi tekanan yang dapat muncul dari dirinya sendiri atau pihak luar (Rustiana dan Indri dalam Retnowati, 2003).

Konsekuensi profesional, auditor harus menjunjung tinggi kode etik profesi dalam setiap menjalankan tugas dan tanggung jawab. Sebagaimana diungkapkan Rustiana dan Indri dalam Retnowati (2003), anggota profesi seharusnya menaati kode etik profesi sebagai wujud kontra prestasi bagi masyarakat dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Stanford (1991) menyebutkan bahwa salah satu segi fungsi audit internal adalah melayani organisasi dan untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, diperlukan *sense of ethical*. Layaknya ketrampilan atau kemampuan lainnya, *sense of ethical* membutuhkan pemahaman dan pelatihan.

Pemahaman auditor atas kode etik dapat disebut sebagai persepsi auditor atas kode etik. Hal ini mengacu pada pengertian persepsi menurut Gibson *et al.* (1996:134) yaitu proses seseorang untuk memahami lingkungan yang meliputi orang, obyek, simbol, dan sebagainya yang melibatkan proses kognitif. Sihwahjoeni dan Gudono (2000) juga mengartikan persepsi sebagai proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkungannya, melalui panca inderanya. Oleh karena tiaptiap individu memberikan makna yang melibatkan tafsiran pribadinya pada obyek tertentu, maka masing-masing individu akan memiliki persepsi yang berbeda meskipun melihat objek yang sama (Gibson *et al.*, 1996:134 ).

Persepsi yang berbeda akan berdampak pada sikap dan perilaku individu. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Sarita dan Agustia (2009), bahwa sikap seorang auditor terhadap pekerjaan yang ditekuninya, secara potensial juga dipengaruhi oleh bagaimana persepsi auditor tersebut terhadap pekerjaannya (Sarita dan Agustia, 2009). Herawati (2007) menyebutkan bahwa pemahaman berkaitan dengan faktor kognitif masing-masing individu auditor tersebut sehingga persepsi auditor satu dengan yang lain akan berbeda.

Persepsi individu atas etika pada akhirnya akan tercermin dalam standar dan norma perilaku yang kemudian diimplementasikan oleh tiap individu dalam pekerjaan sehari-hari (Zarkasyi, 2009). Dalam kondisi tertentu, pengimplementasian tersebut akan menghadapkan auditor pada situasi dilema etika. Menurut Budi dkk. (www.theakuntan.com), dilema etika muncul sebagai konsekuensi konflik audit karena auditor berada dalam situasi pengambilan keputusan yang terkait dengan keputusannya yang etis atau tidak etis.

Situasi konflik peran, pertimbangan profesional berlandaskan pada nilai dan keyakinan individu serta kesadaran moral memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan akhir (Muawanah dan Indriantoro, 2001). Standford (1991) menyebutkan bahwa salah satu alat yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan etis adalah kode etik. Kode etik mengatur perilaku anggota profesi dan memuat prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi (Beauchamp dan Bowie, 2002). Sihwahjoeni dan Gudono (2000) mengungkapkan bahwa kode etik profesi memberikan beberapa solusi langsung yang mungkin tidak tersedia dalam teori-teori etika umum karena kode etik menyatakan secara eksplisit beberapa kriteria tingkah laku yang khusus terdapat pada profesi. Dengan demikian kode etik memainkan peran yang krusial bagi para profesional ketika ia membutuhkan pertimbangan profesional dalam memecahkan persoalan etika.

Ludigdo dan Machfoedz (1999) mengemukakan bahwa profesi akuntan tidak terlepas dari etika bisnis yang mana aktivitasnya melibatkan aktivitas bisnis yang perlu pemahaman dan penerapan etika profesi seorang akuntan serta etika bisnis. Apabila setiap akuntan mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan kemauan untuk menerapkan nilai-nilai moral dan etika secara memadai dalam melaksanakan pekerjaan profesinya, maka pelanggaran etika yang sering terjadi semestinya dapat dihindarkan (Ludigdo dan Machfoedz, 1999). Beauchamp dan Bowie (2002) mengungkapkan bahwa kode etik profesi harus dipatuhi agar pelaksanaan kinerja profesional dapat mencapai tujuan penugasan. Dengan demikian, auditor internal sebagai profesi seperti profesi lainnya harus memahami dan menaati tuntutan sikap dan moral profesi (kode etik profesi) sehingga kemungkinan terjadinya pelanggaran etika dapat diminimalkan dan kinerja optimal dapat tercapai.

Banyak masalah yang terjadi pada berbagai kasus bisnis saat ini melibatkan profesi akuntan. Sorotan yang diberikan kepada profesi ini disebabkan oleh faktor diantaranya praktik-praktik profesi yang mengabaikan standar akuntansi bahkan etika perilaku yang tidak etis merupakan isu yang relevan bagi profesi akuntan saat ini. Pelanggaran etika oleh akuntan publik misalnya dapat berupa opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi tertentu menurut norma pemeriksaan akuntan atau standar profesional akuntan publik. Pelanggaran etika oleh akuntan intern misalnya dapat berupa rekayasa data akuntansi untuk menunjukan kinerja keuangan perusahaan agar tampak lebih baik, sedangkan pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan pemerintahan misalnya berupa pelaksanaan pemeriksaan yang tidak semestinya.

Sementara itu krisis moral yang cukup fenomenal dapat dicermati antara lain kasus “Enron”, dimana dalam kasus ini terlihat salah satu *the big five accounting film* “Arthur Anderson”. Suatu kasus yang sedemikian kompleks, yang kemudian diikuti mencuatnya kasus-kasus lainnya. Kasus-kasus skandal keuangan ini tidak saja berakibat pada menurunnya kinerja perekonomian Amerika Serikat (yang ditandai dengan menurunnya harga saham di wall Street dan indeks harga saham Dow Jones), tetapi kemudian juga merembet ke negara-negara lainnya. Peristiwa ini kemudian memicu kalangan pemerintahan dan legislatif di Amerika Serikat untuk meninjau kembali perangkat hukum yang mengatur perusahaan (korporat) dan praktik akuntan publik. Dalam perspektif etika, kasus inipun kemudian berimplikasi pada munculnya keraguan banyak pihak pada berbagai aspek kunci dari etika profesi akuntan.

Berdasarkan hal yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti mempunyai maksud membuat penelitian untuk mengetahui bagaimana persepsi atau pemahaman auditor internal dan mahasiswa calon auditor internal terhadap persoalan-persoalan etika dan perilaku etis yang mungkin mereka hadapi. Untuk itu dalam studi ini akan dilakukan observasi mengenai persepsi mereka terhadap perilaku etis.

Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi (sebagai calon auditor) dan auditor internal yang berperan dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi sistem pengendalian internal. Internal auditor sebagai pekerja di dalam organisasi yang diauditnya akan menjumpai masalah ketika harus melaporkan temuan-temuan yang mungkin tidak menguntungkan dalam penilaian kinerja manajemen atau obyek audit yang dilakukannya. Ketika manajemen atau subyek audit menawarkan sebuah imbalan atau tekanan kepada internal auditor untuk menghasilkan laporan audit yang diinginkan oleh manajemen maka menjadi dilema etika. Untuk itu auditor dihadapkan kepada pilihan-pilihan keputusan yang terkait dengan hal-hal keputusan etis dan tidak etis.

Penelitian ini melakukan observasi dengan membandingkan persepsi auditor internal dengan calon mahasiswa auditor internal terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut perilaku etis. Oleh karena itu peneliti menyimpulkan judul penelitian ini sebagai berikut : **“Persepsi Auditor Internal dan Mahasiswa Calon Auditor Internal Terhadap Perilaku Etis dalam Etika** **Bisnis”**

**1.2 Batasan Masalah**

Penelitian ini lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud dalam Tugas Akhir ini. Penulis membatasinya pada ruang lingkup penelitian berupa, Persepsi, Auditor Internal, Mahasiswa Calon Auditor Internal dan Perilaku Etis.

**1.3 Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

“Apakah terdapat perbedaan persepsi antara auditor internal dan mahasiswa calon auditor internal terhadap perilaku etis ?

**1.4 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui perbedaan persepsi antara auditor internal dan mahasiswa calon auditor internal terhadap perilaku etis.

**1.5 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagi Auditor Internal, Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat menjaga mutu jasa auditnya dan mempertahankan independensi auditor.

2. Bagi Politeknik, Penelitian ini dapat memberikan masukan dalam hal pengembangan kurikulum khususnya pada prodi DIV Akuntansi Keuangan pada mata kuliah Audit Internal.

3. Bagi Penulis, Dapat menambah wawasan bagi penulis tentang persepsi auditor internal dan mahasiswa calon auditor internal terhadap perilaku etis.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Teori dan Konsep**

**1. Persepsi**

Persepsi sering disebut sebagai pandangan, gambaran, atau tanggapan. Sebab dalam persepsi terdapat tanggapan seseorang mengenai satu hal atau objek. Beberapa pengertian persepsi menurut para ahli diantaranya, Menurut Slameto (2010:102) Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indra penglihat, pendengar, peraba dan perasa. Menurut Purwodarminto (1990:759), persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pengindraan.

Dalam kamus besar psikologi, persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indra-indra yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya.

Persepsi juga merupakan pengalaman tentang objek atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Meskipun demikian, persepsi tentang objek atau peristiwa tersebut bergantung pada suatu kerangka ruang dan waktu, maka persepsi akan bersifat sangat subjektif dan situasional. Persepsi ditentukan oleh faktor personal dan situasional. Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal-hal lain yang termasuk dalam faktor fungsional. Oleh karena itu, yang menentukan persepsi bukanlah jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberikan respons terhadap stimuli tersebut. Sementara itu, faktor struktural berasal dari sifat fisik dan dampak saraf yang ditimbulkan pada sistem saraf individu.

Robbins (2009: 175) mendefinisikan persepsi (*perception*) sebagai proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Menurut Gibson *et al*. (1996:134), persepsi adalah proses seseorang untuk memahami lingkungan yang meliputi orang, obyek, simbol, dan sebagainya yang melibatkan proses kognitif. Proses kognitif merupakan proses pemberian arti yang melibatkan tafsiran pribadi terhadap rangsangan yang muncul dari obyek tertentu. Oleh karena tiap-tiap individu memberikan makna yang melibatkan tafsiran pribadinya pada obyek tertentu, maka masing-masing individu akan memiliki persepsi yang berbeda meskipun melihat objek yang sama. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Robbins (2002) bahwa riset tentang persepsi secara konsisten menunjukkan bahwa individu yang berbeda dapat melihat hal yang sama tetapi memahaminya secara berbeda.

Persepsi berperan dalam penerimaan rangsangan, mengaturnya, dan menerjemahkan atau menginterpretasikan rangsangan yang sudah teratur untuk mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap. Menurut Walgito (1997:53), ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar individu dapat memahami dan dapat membuat persepsi. Syarat-syarat tersebut yaitu:

a. Adanya objek yang dipersepsikan (fisik).

b. Adanya alat indera/reseptor untuk menerima stimulus (fisiologis).

c. Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama dalam mengadakan persepsi (psikologis).

**2. Auditor Internal**

a. Pengertian Audit Internal

Auditor Internal sebagai suatu aktivitas independen, yang memberikan jaminan keyakinan serta konsultasi yang dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi dalam usaha mencapai tujuannya dengan cara memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen risiko, pengendalian, dan proses pengaturan dan pengelolaan organisasi. Sedangkan Mulyadi (2002:29) mendefinisikan auditor internal sebagai auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.

Auditor internal diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika dalam kode etik sebagai berikut :

1) Integritas

Integritas auditor internal membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk landasan penilaian mereka.

2) Obyektivitas

Auditor harus menjunjung tinggi ketidak berpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi *auditee*. Auditor membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

3) Kerahasiaan

Auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

4) Kompetensi

Auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

b. Aturan Perilaku

Auditor wajib mematuhi aturan perilaku berikut ini yaitu :

1). Integritas

a). Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh

b).Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;

c).Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;

d).Menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;

e).Tdak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;

f).Menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama auditor dalam pelaksanaan audit;

g).Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor.

2). Obyektivitas

a).Mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diaudit;

b).Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubunganhubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;

c).Menolak suatu pemberian dari auditi yang terkait dengan

keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.

3). Kerahasiaan

a).Secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit;

b).Tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

4) Kompetensi

a).Melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit;

b).Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan;

c).Menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang

dimiliki.

c. Peran Auditor Internal

Pada masa lalu, fokus utama peran auditor internal adalah sebagai *‘watchdog’* dalam perusahaan sedangkan pada masa kini dan mendatang, proses audit internal telah bergeser menjadi konsultan intern yang memberi masukan berupa pikiran-pikiran perbaikan atas sistem yang ada dan berperan sebagai katalis (Effendi, 2007). Peran sebagai *‘watchdog’* membuat auditor internal kurang disukai oleh unit organisasi lain. Auditor internal sering dipandang sebagai tukang cari kesalahan. Setiap kegiatan audit yang dijalankan seolah-olah hanya bertujuan untuk mencari temuan sebanyakbanyaknya. Disamping itu, auditor juga dianggap ahli dalam masalah pengendalian dan ketaatan (*control and compliance*) namun tidak dalam urusan yang menyangkut bisnis organisasi. Sehingga dalam memberikan rekomendasi selalu menyangkut permasalahan yang dianggap sudah berlalu dan tidak mempunyai keterkaitan dengan masa depan (Pramono, 2003). Dalam peran yang baru, auditor internal lebih berposisi sebagai konsultan internal organisasi. Kegiatan pemeriksaan yang sebelumnya hanya terfokus pada *compliance audit* bergeser pada *operational/performance audit*. Peran konsultan sebagai konsultan ini dilakukan dengan cara menggabungkan proses pengendalian dan ketaatan dengan penguasaan bisnis utama (*core function*) organisasi di mana auditor internal tersebut berada (Duncan & Nixon, 1999). Hasilnya bagi organisasi adalah selain dapat menjaga pengendalian dan ketaatan atas kegiatan operasional organisasi, auditor internal juga memberikan nilai tambah berupa rekomendasi yang berguna bagi perbaikan kinerja.

Rekomendasi auditor internal dinilai mempunyai nilai tambah apabila memenuhi karakteristik antara lain:

a. Menawarkan perbaikan efisiensi dan efektivitas.

b. Memungkinkan penggunaan teknologi.

c. Berorientasi pada perkembangan masa mendatang.

d.Mengemukakan perubahan positif daripada mempertahankan ‘*status quo*.’

Dalam menjalankan peran sebagai konsultan, pengetahuan dan pemahaman auditor internal atas seluk beluk bisnis menjadi kunci sukses keberhasilan sebagai konsultan. Pengetahuan bisnis dapat meliputi antara lain yaitu konsep manajemen, organisasi, ekonomi, dan hukum. Pada perkembangan berikutnya, peran sebagai konsultan dirasakan masih kurang memadai dalam mengakomodasi harapan manajemen dan *stakeholder* lainnya. Selanjutnya, muncul peran auditor yang baru, yaitu sebagai katalisator. Sebagai seorang katalisator, auditor harus mampu memberikan jasa kepada manajemen melalui saran-saran yang konstruktif dan dapat diaplikasikan (*applicable*) bagi kemajuan perusahaan (Effendi, 2007; Poedjiono, 1996).

Ruang lingkup kegiatan auditor ikut pula berubah menjadi *quality assurance*. Pelaksanaan *quality assurance* pada prinsipnya mengacu pada konsep kepuasan konsumen. Artinya setiap langkah kegiatan audit yang dilakukan akan bermuara pada pemenuhan kebutuhan konsumen. Konsumen audit akan merasa puas apabila produk jasa audit yang dihasilkan mempunyai kualitas yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Sedangkan produk yang berkualitas hanya dapat dihasilkan oleh suatu proses audit yang sudah ditetapkan *standard*-nya (Pramono, 2003).

**3. Mahasiswa Akuntansi (Sebagai Calon Auditor)**

Mahasiswa akuntansi adalah mahasiswa yang kuliah pada jurusan akuntasi di suatu universitas atau perguruan tinggi negeri atau swasta. Pendidikan akuntansi selayaknya diarahkan untuk memberi pemahaman konseptual yang didasarkan pada penalaran sehingga ketika akhirnya masuk ke dalam dunia praktik dapat beradaptasi dengan keadaan sebenarnya dan memiliki *resistance to change* yang rendah terhadap gagasan perubahan atau pembaruan yang menyangkut profesinya (Suwardjono 1992 dalam Abdullah 2002).

Dalam mata kuliah etika bisnis dan profesi telah diajarkan menyangkut prinsip dan kode etik dalam bisnis yaitu :

a. Integritas

Banyak yang menginterpretasikan integritas sama dengan kejujuran, meski sebenarnya konsep integritas lebih luas dari konsep kejujuran. Kejujuran hanya merupakan salah satu unsur yang membangun integritas sesorang. Menurut Julian M dan Alfred (2007) yang mengatakan bahwa integritas merujuk pada segala hal yang membuat seseorang bisa dipercaya. Ini berarti ada beberapa atribut atau kualitas-kualitas karakter individu terkait yang membentuk integritas tersebut. Atribut-atribut ini, antara lain :kejujuran, tindakan benar, tanggung jawab, kematangan, loyalitas, ketekunan dan tidak korup.

b. Kompetensi

Kompetensi berarti kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya, orang yang kompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Dalam arti luas, kompetensi mencakup penguasaan ilmu/pengetahuan *(knowledge)*, dan keterampilan *(skill)* yang mencakupi, serta mempunyai sikap dan perilaku *(attitude)* yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan/profesinya. Bila pengertian kompetensi mencakup ketiga unsur ini-pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku, maka orang yang kompeten sama artinya dengan orang yang profesional. Namun sering kali konsep *kompetensi* dimaksudkan dalam pengertian yang lebih sempit, yaitu hanya dikaitkan dengan pengetahuan dan keterampilan saja, tanpa mempertimbangkan sikap dan perilaku

c. Obyektifitas

Obyektif berarti tujuan, sesuai sasaran, tidak berat sebelah, selalu didasarkan atas fakta atau bukti yang mendukung. Konsep ini menyirat bahwa segala sesuatu diungkapkan apa adanya, tidak menyembunyikan sesuatu, jujur, dan wajar *(fair)*

d. Independensi

Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan. Dalam profesi akuntan publik, istilah independensi dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu independent in fact dan independent in appearance artinya menurut pandangan orang lain terutama dilihat dari sudut pandang hubungan secara fisik yang bersangkutan diragukan independensinya, walaupun mungkin secara mental yang bersangkutan tetap bersifat independen. Contoh auditor memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan dimana yang menjabat sebagai manajer akuntansi diperusahaan tersebut adalah adik kandungnya. Walaupun secara mental, auditor tersebut bisa saja bersikukuh akan bertindak independen, tetapi orang lain tetntu saja meragukannya karena adanya fakta bahwa berdasarkan tampilan fisik auditor dengan menejer akuntansi perusahaan yang diauditnya masih bersaudara kandung sehingga tidak dapat disebut *independent in appearance.*

**4. Etika dan Perilaku Etis**

a. Pengertian Etika

Etika *(ethics)* berasal dari bahasa Yunani *ethos,* yang berarti “karakter”. Kata lain untuk etika adalah moralitas *(morality)*, yang berasal dari bahasa Latin *mores*, yang berarti “kebiasaan”. Moralitas berpusat pada “benar” dan “salah” dalam perilaku manusia. Oleh karena itu, etika berkaitan dengan pertanyaan tentang bagaimana orang akan berperilaku terhadap sesamanya.

Etika menaruh perhatian pada perilaku manusia, atau kegiatan manusia yang dijalani secara sadar dan dikehendaki. Etika secara umum berkenaan dengan tindakan dan praktik yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Sebagai suatu bidang studi, etika mengkaji apa yang baik atau yang benar bagi manusia, tujuan apa yang seharusnya dicapai oleh manusia dan tindakan apa yang seharusnya ditempuh.

“Etika merupakan upaya sistematik, dengan menggunakan nalar, untuk memaknai pengalaman moral kita sebagai manusia baik secara individual maupun secara sosial sedemikian rupa dalam rangka menentukan kaidahkaidah yang seharusnya mengatur perilaku kita dan nilai-nilai yang berharga untuk kita anut dalam kehidupan ini” (Kusmanandji, 2003: 1-1)”

Etika bisnis merupakan aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan benar untuk beragam institusi, transaksi, teknologi, aktivitas dan usaha yang kita sebut bisnis. Pembahasan tentang etika bisnis harus dimulai dengan menyediakan kerangka prinsip-prinsip dasar pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan istilah baik dan benar. Etika dan Bisnis mendeskripsikan etika bisnis secara umum dan menjelaskan orientasi umum terhadap bisnis, dan mendeskripsikan beberapa pendekatan khusus terhadap etika bisnis, yang secara bersama-sama menyediakan dasar untuk mengalisis masalah-masalah etis dalam bisnis.

Dalam dunia bisnis, setiap pebisnis yang jujur pastilah ingin berbisnis secara etis. Untuk itu, mereka membangun tata kelola yang diperkuat dengan panduan etika bisnis dan kode etik kerja. Sudut pandang etika (moral), yakni penilaian nerdasarkan kriteria moral, memiliki dua ciri khas. Pertama adalah kemauan untuk menemukan dan bertindak berdasarkan alasan atau nalar (*reasons*). Artinya, dalam membuat pertimbangan atau melakukan penilaian etis kita harus memiliki komitmen untuk menggunakan alasan dalam menentukan mengenai apa yang harus dilakukan dan menyusun argumen-argumen moral yang meyakinkan diri kita sendiri dan orang lain. Kedua, sudut pandang moral mengharuskan kita untuk objektif atau tidak memihak (*impartial*). Dalam hal ini, kita harus memasukkan kepentingan orang lain, dan juga kepentingan kita sendiri, dalam pertimbangan kita dan memberikan bobot yang sama pada semua kepentingan dalam memutuskan apa yang harus kita lakukan (Kusmanandji, 2003: 1-5).

Etika profesi merupakan salah satu unsur penting dari setiap profesi, tak terkecuali profesi akuntansi. Etika profesi ini merupakan sarana pengaturan diri (*self-regulation*), yang sangat menentukan bagi pelaksanaan profesi sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntansi ditentukan oleh kepatuhan para akuntan terhadap standar etika yang disepakati (Kusmanandji, 2003: 16-1). Apabila seorang auditor melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis, maka hal tersebut akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi auditor itu (Khomsiyah dan Indrianto, 1998).

Sebagai individu, para akuntan juga dapat tergoda dan terjerumus pada perilaku tidak etis seperti individu-individu lainnya. Sedikit orang yang mau menganggap dirinya sendiri sebagai penjahat Karena itu, mereka seringkali menyusun rasionalisasi untuk membenarkan perilaku mereka yang menyimpang (Kusmanandji, 2003: 16-2). Oleh karena itu, etika diperlukan, tetapi hal ini sangat kompleks untuk dilakukan (Dellaportas et al., 2005: 13).

**5. Peran Kode Etik**

Kode etik pada prinsipnya merupakan sistem dari prinsip-prinsip moral yang diberlakukan suatu kelompok profesi yang ditetapkan secara bersama. Kode etik profesi merupakan ketentuan perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap mereka yang menjalankan tugas profesi tersebut. Kode etik profesi yang mengikat semua anggota profesi perlu ditetapkan bersama. Tanpa kode etik, maka setiap individu dalam satu komunitas akan memiliki tingkah laku yang berbeda-beda yang dinilai baik menurut anggapannya dalam berinteraksi dengan masyarakat lainnya.

Menurut Tugiman (1997), kode etik merupakan ketentuan untuk mengatur tingkah laku individu agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kode etik atau aturan perilaku dibuat sebagai pedoman dalam perilaku atau melaksanakan penugasan sehingga menumbuhkan kepercayaan dan memelihara citra organisasi di mata masyarakat. Kepercayaan masyarakat dan pemerintah atas hasil kerja auditor ditentukan oleh keahlian, independensi, dan integritas auditor dalam menjalankan pekerjaannya (Tugiman, 1997). Dengan adanya kode etik, masyarakat akan dapat menilai sejauh mana seorang auditor telah bekerja sesuai dengan standar-standar etika yang telah ditetapkan oleh profesinya (Trisnaningsih, 2007; Sukriah dkk., 2009).

Lebih lanjut, kode etik profesi merupakan salah satu upaya dari suatu asosiasi profesi untuk menjaga integritas profesi tersebut agar mampu menghadapi tekanan yang dapat muncul dari dirinya sendiri atau pihak luar (Rustiana dan Indri dalam Retnowati, 2003). Oleh karena itu, auditor internal sebagai anggota profesi berkepentingan untuk mematuhi kode etik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Rustiana dan Indri dalam Retnowati (2003) bahwa anggota profesi seharusnya menaati kode etik profesi sebagai wujud kontra prestasi bagi masyarakat dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Beauchamp dan Bowie (2002) juga mengungkapkan bahwa kode etik profesi harus dipatuhi agar pelaksanaan kinerja profesional dapat mencapai tujuan penugasannya.

**6**. **Pengertian dan Penyebaran Perilaku Etis**

Secara umum, perilaku diartikan sebagai kegiatan individu atas sesuatu yang berkaitan dengan individu tersebut yang diwujudkan dalam bentuk gerak atau ucapan. Sedangkan etis diartikan sebagai a) berhubungan dengan etika dan b) sesuai dengan asas perilaku yang disepakati secara umum.( Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991) Menurut Redi Panuju, penyebaran tindakan etis dapat dilakukan melalui:

1. Kemauan Individu.

Tindakan etis sesungguhnya adalah persoalan yang lebih bersifat individual. Melalui individu-individu inilah tindakan etis bias “melembaga” menjadi konvensi. Apabila bagi individu dianggap senior, sehingga disebut “suhu” dalam dunia bisnis maka posisinya cenderung sebagai pemuka pendapat dibidangnya. Dari sinilah pengetahuan tentang bisnis menyebar. Individu-individu yang mempunyai kontribusi dalam menegakkan dan menyebarkan etika bisnis adalah : a) individu yang telah menyerap atau mengerti etika bisnis yang diperoleh melalui proses belajar *(individual learning).* Hal ini tersebut karena yang bersangkutan memiliki beberapa kemampuan seperti kemampuan untuk kesadaran etis *(ethical sensibility)*, kemampuan untuk berpikir secara etis *(ethical* *reasoning)*, kemampuan untuk bertindak etis *(ethical conduct),* kemampuan kepemimpinan etis *(ethical leadership).* b) individu yang mempunyai karisma, c) individu yang memiliki kekuasaan, meskipun tindakan etis seseorang yang didorong oleh kekuasaan orang lain bersifat artificial (tidak murni), tetapi bila yang bersangkutan menggunakan kekuasaannya secara etis maka etika akan tersebar melalui proses identifikasi.

1. Konsensus Sosial.

Etika bisnis akan menyebar apabila dalam interaksi sosial masing-masing pihak standar nilai yang telah ditetapkan. Apabila konsensus sosial belum tercapai, bukan saja menyebabkan timbulnya standar ganda, tetapi juga bias menimbulkan kaburnya (bias) tindakan-tindakan bisnis secara etis. Orang menjadi sulit membedakan mana yang etis dan mana yang tidak etis dalam perilaku bisnis.

1. Nilai Tradisi.

Standar etika bisnis akan diteruskan masyarakat apabila tersedia nilai-nilai tradisi dalam masyarakat tersebut yang relevan.

1. Agama

Setiap pelaku bisnis seharusnya memperhatikan aksioma-aksioma etika (pernyataan yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya) yang bersumber dari agama.

e. Hukum

Hukum merupakan sarana yang efektif bagi penyebar dan tindakan etis. Hukum memang bukan etika. Hukum dibuat manusia untuk mengatur hak dan tanggung jawab (kewajiban) manusia dengan sanksi tertentu, sedangkan etika tidak bersinggungan dengan sanksi dalam bentuk hukuman atau denda. Konsekuensi tindakan etis hanya sebatas sanksi dalam bentuk rasa malu, rasa bersalah, dan rasa berdosa kecuali jika tindakan etis tersebut telah menjadi persoalan kriminal.

Dengan demikian hukum merupakan salah satu embrio dari lahirnya tindakan etis yaitu manakala butir-butir hukum diimplementasikan dalam tindakan-tindakan. Tidak semua tindakan hukum merupakan tindakan etis. Etis tidaknya implementasi tergantung kepada apakah akibat-akibatnya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan. Adakalanya hukum yang dibuat untuk manusia justru tidak atau mengurangi memperhatikan asas keadilan sehingga kehadiran hukum dalam kehidupan social justru menjadi sumber tindakan tidak etis.

1. Komunikasi.

Teknologi komunikasi bisa menjadi saluran yang memperbesar atau meninggikan frekuensi tindakan tidak etis karena disamping teknologi komunikasi ini membawa harapan baru bagi umat manusia untuk hidup lebih baik *(quality* *life)*, ternyata kehadirannya dengan dipakai sebagai alat merusak harkat dan martabat umat manusia sendiri. (Panuju, 1995 : 13-18)

**2.2 Hipotesis**

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti menyimpulkan hipotesis yang terjadi sebagai berikut :

Ho : Tidak Terdapat perbedaan persepsi perilaku etis auditor internal dengan persepsi perilaku etis mahasiswa calon auditor internal.

Ha : Terdapat perbedaan persepsi perilaku etis auditor internal dengan persepsi perilaku etis mahasiswa calon aditor internal.

**2.3 Kerangka Berfikir**

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Penelitian

Auditor Internal

Mahasiswa Calon Auditor Internal

Persepsi Perilaku Etis

Uji Beda

*(Independent Sample t-test)*

Keterangan :

Auditor Internal dan Mahasiswa Calon Auditor Internal merupakan responden yang dihadapkan pada persoalan persepsi perilaku etis. Auditor internal diasumsikan telah terpengaruh oleh faktor-faktor yang menyebabkan seseorang yang tidak berperilaku etis misalnya, kejujuran auditor, keberanian auditor, sikap bijaksana, tanggung jawab, bebas dari benturan kepentingan, pengungkapan kondisi sesuai dengan fakta, kehati-hatian atas informasi yang diperoleh, penggunaan dan pengungkapan informasi, mutu personal, pengetahuan umum, keahlian khusus. Sehingga persepsi auditor internal dan persepsi mahasiswa akan berbeda mengenai perilaku etis dalam etika bisnis. Karena adanya perbedaan kondisi dimana auditor internal sebagai orang yang telah terjun kedunia usaha, sedangkan mahasiswa akuntansi belum terjun kedunia usaha. Maka dilakukan uji beda dengan menggunakan *independent sample t-Test.*

**2.4 Hasil Penelitian yang Relevan**

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sangat penting untuk diungkapkan karena dapat dipakai sebagai sumber informasi dan bahan acuan yang sangat berguna bagi penulis. Penelitan terdahulu mengenai persepsi auditor internal dan mahasiswa calon auditor terhadap perilaku etis dapat dilihat pada table berikut ini :

Table Ringkasan Penelitian Terdahulu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Peneliti | Judul Peneliti | Hasil Penelitian |
| 1. | Monica, 2007 | “Persepsi auditor internal atas kode etik” | Penelitiannya menguji hubungan persepsi auditor internal atas kode etik dengan efektivitas pelaksanaan audit. Studinya dilakukan pada beberapa bank di Bandung dan hasilnya menyimpulkan  bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi auditor internal atas  kode etik dengan efektivitas pelaksanaan audit. |
| 2. | Aryawan (2008) | “Pengaruh persepsi para manajer  mengenai fungsi audit internal terhadap kinerja auditor internal” | Penelitiannya merupakan studi kasus yang dilakukan di Universitas Widyatama, Bandung. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa persepsi para manajer mengenai fungsi audit internal cukup berdampak bagi kinerja auditor internal |
| 3. | Sukriah dkk. (2009) | “Pengaruh pengalaman kerja,  independensi, obyektifitas, integritas, dan kompetensi terhadap kualitas hasil  pemeriksaan” | Responden penelitiannya adalah auditor internal pemerintah yang bekerja di Inspektorat se-Pulau Lombok. Hasil penelitiannya  menunjukkan bahwa pengalaman kerja, obyektifitas dan kompetensi  berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Dengan demikian, semakin banyak pengalaman kerja, semakin obyektif auditor melakukan pemeriksaan dan semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki auditor, maka semakin meningkat atau semakin baik kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukannya. |

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

**3.1 Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat dan waktu penelitian adalah Auditor Internal yang ada di Perusahaan di kota manado sulawesi utara dan Mahasiswa semester 8 di Kampus Politeknik Negeri Manado dengan menyebarkan kuesioner. Waktu penelitian dilaksanakan selama 3 bulan (Mei-Juli).

Tabel 3.1 Nama Perusahaan Auditor Internal

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama Perusahaan | Jumlah Auditor Internal |
| 1. | PT. BWBC | 3 |
| 2. | PT. Dirga Gerak Semesta | 2 |
| 3. | PT. Oto Multiartha | 2 |
| 4. | PT. Jasa Asuransi | 3 |
| 5. | PT. Maesa Nugraha | 1 |
| 6. | PT. Graha Motor | 1 |
| 7. | PT. Toyota | 1 |
| 8 | PT. Enseval Putera Meqatrading | 1 |
| 9. | PT. Sinar Galesong | 1 |
| 10. | PT. Siloam International Hospital Manado | 1 |
| 11. | Hotel Peninsula | 1 |
| 12. | Hotel Angkasa Pura | 4 |
| 13. | Hotel Grand Puri | 1 |
| 14. | Hotel Travelo | 1 |
| 15. | BTPN | 3 |
| 16. | Bank Bukopin | 2 |
| 17. | PT. Pelindo | 2 |

**3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian terhadap masalah yang berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Sedangkan metode pengumpulan data yang dipakai adalah dengan cara survey, yaitu suatu penelitian yang mengambil sejumlah sample tertentu dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner (daftar pertanyaan) sebagai alat pengumpul data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian (Indriantoro dan Supomo, 1999:146). Data primer merupakan data pokok dalam penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti dengan menggunakan metode survey melalui penyebaran kuesioner kepada responden.

**3.3 Populasi dan Teknik Penarikan Sampel**

**1. Populasi Penelitian**

Menurut Sugiyono (2008:115), “Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Auditor Internal di perusahaan yang ada di Manado dan Mahasiswa akuntansi semester 8 di Politeknik Negeri Manado sebagai calon auditor internal.

**2. Sampel Penelitian**

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan dipelajari secara detail (Sekaran, 200). Beberapa Pengertian sampel menurut para ahli, Menurut Husein Umar (2005;82), menyatakan bahwa sampel probability adalah “ Suatu metode pemilihan ukuran sampel dimana setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk menjadi anggota sampel. “ Menyeleksi sampel dari populasi sejak awal dan mengikuti pemilihan sampel berdasarkan urutan elemen. (Zikmud 2000;363). Lebih lanjut Sugiyono (2009;100), menyatakan bahwa pedoman umum penarikan sampel yaitu sebagai berikut “Untuk pedoman umum dapat dikatakan bahwa bila populasi dibawah 100 orang maka dapat digunakan sampel 50% dan jika diatas 100 orang sebesar 15%.

Sampel adalah bagian yang diambil dari suatu populasi yang karakteristiknya diteliti dan dianggap dapat mewakili populasi secara keseluruhan ( Sunyoto, 2011;18). Penentuan sampel dalam pengumpulan responden auditor internal dengan metode purposive sampling, maka jumlah sampel yang diambil adalah 30 responden auditor internal yang sudah mewakili jumlah auditor internal yang ada di Sulawesi Utara. Merujuk pada pendapat Sugiyono diatas, maka jumlah sampel Responden mahasiswa akuntansi semester 8 yang diambil sebesar 50% dari jumlah populasi sebanyak 99 orang. Berdasarkan perhitungan 50% x 99 = 49,5 Jadi dibulatkan 50 sampel. Sehingga sampel yang didapat untuk dijadikan objek penelitian adalah sebanyak 50 orang.

**3.4 Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian perpustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

a. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peninjauan langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan informasi dengan membagikan kuesioner. Menurut Husein (2009: 49), kuesioner merupakan suatu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan atau pernyataan kepada responden dengan harapan memberikan respons atas daftar pertanyaan yang mencerminkanbagaimana perilaku etis para responden dalam hal ini auditor danmahasiswa calon auditor internal.

b. Penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan peninjauan pustaka dari berbagai literatur karya ilmiah, majalah, dan buku-buku yang menyangkut teori-teori yangrelevan dengan masalah yang dibahas.

c. Mengakses *website* dan situs-situs untuk memperoleh informasi sehubungan dengan masalah dalam penelitian.

**3.5 Teknik Analisis Data**

**1. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Data**

Mengingat pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, maka kualitas kuesioner dan kesanggupan responden dalam menjawab pertanyaan merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ini. Oleh karena itu, kesimpulan dari hasil penelitian tergantung pada kualitas data yang dianalisis dan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Ada dua syarat penting yang berlaku pada sebuah kuesioner yaitu harus valid dan reliabel (Sunyoto, 2011: 68).

Data penelitian tidak akan berguna jika instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data penelitian tidak memiliki *reliability* (tingkat keandalan) dan *validity* (tingkat keabsahan) yang tinggi. Uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini dengan menggunakan bantuan program komputer yaitu SPSS *(Software Statistics Product for the Social Science)* versi 20.

a. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau sahnya suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sah mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat (Sunyoto, 2011: 69).

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik yaitu menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total dengan menggunakan metode *Product Moment Pearson Correlation*. Data dinyatakan valid jika nila r-hitung yang merupakan nilai dari *Corrected Item-Total* *Correlation* > dari r-tabel pada signifikansi 0.05 (5%).

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius yang mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya memang benar sesuai dengan kenyataannya maka berapa kalipun diambil, tetap akan sama. Butir kuesioner dikatakan reliabel (layak) jika *cronbach’s alpha* > 0,60 dan dikatakan tidak reliabel jika *cronbach’s alpha* < 0,60 (Sunyoto, 2011: 70).

**2 Pengujian Asumsi**

Analisis berikutnya adalah menguji persyaratan alat uji hipotesis. Uji

asumsi ini meliputi uji normalitas sebaran dan uji homogenitas varians. Pengujian ini dilakukan sesuai dengan model analisis yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis yaitu *Independent Sample t-test* yang mensyaratkan data terdistibusi normal dan varian kelompok homogen.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk mendeteksi distribusi data dalam suatu variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak untuk membuktikan model-model penelitian tersebut adalah data yang memiliki distribusi normal. Uji normalitas sebaran data dalam penelitian ini menggunakan *Metode Statistical Packages for Social Science (SPSS) Kolmogorov-Smirnov Test.*

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama. Uji homogenitas pada uji perbedaan dimaksudkan untuk menguji bahwa setiap kelompok yang akan dibandingkan memiliki variansi yang sama. Dengan demikian perbedaan yang terjadi dalam hipotesis benar-benar berasal dari perbedaan antara kelompok. Uji homogenitas data dalam penelitian ini menggunakan *Metode Statistical Packages for Social Science (SPSS) Test of* *Homogenity of Variances.*

**2. Pengujian Hipotesis**

Analisis utama adalah pengujian hipotesis. Untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis statistic *Independent Sample t-test* dengan menggunakan bantuan program *Statistic Packages for Social Science (SPSS)* karena sampel yang diuji terdiri dari dua kelompok yang saling independen dan bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak adanya perbedaan persepsi diantara kelompok sampel.

*Independent Sample t-test*, prinsipnya ingin mengetahui apakah ada perbedaan mean antara dua populasi, dengan membandingkan dua mean sample-nya. Pengujian hipotesis Uji beda *t-test* dengan sample independen (*independent Sample t-test*) digunakan untuk menetukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Ada dua tahap analisis dilakukan dalam uji beda :

a. Pertama, menguji apakah variance populasi kedua sampel tersebut sama ataukah berbeda dengan melihat nilai levene test

b. Kedua, dengan melihat nilai *t-test* untuk menetukan apakah terdapat perbedaan nilai rata-rata secara signifikan. Pengambilan keputusan berdasarkan :

1). Jika p-value > 0,05 maka Ho  ditolak dan Ha diterima

2). Jika p-value < 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak

**3.6 Deskripsi dan Pengukuran Variabel Penelitian**

**1. Definisi Variabel Penelitian**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu persepsi auditor internal dan mahaiswa calon auditor internal terhadap perilaku etis yang dioperasionalkan dalam empat sub variabel yaitu:

a. Integritas, yaitu sikap jujur, berani, bijaksana, dan tanggung jawab auditor dalam melaksanaka audit ( Sukriah dkk, 2009).

b. Obyektifitas, yaitu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota (Sukriah dkk, 2009). Prinsip obyektivitas mengharuskan auditor menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditi.

c. Kerahasiaan, yaitu prinsip bahwa auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimannya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

d. Kompetensi, yaitu kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar, yaitu diukur dengan indikator personal, pengetahuan umum, dan keahlian khusus.(Sukriah dkk, 2009)

**2. Pengukur Variabel Penelitian**

Skala yang digunakan dalam penyusunan kuesioner penelitian adalah skala Likert, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social (Sugiyono, 2003: 86). Sewaktu menanggapi pertanyaan dalam skala likert, responden menetukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Biasanya disediakan lima pilihan skala dengan format seperti :

1). Jawaban A sangat setuju diberi score 5

2). Jawaban B setujuh diberi score 4

3). Jawaban C Netral diberi score 3

4). Jawaban D tidak setujuh diberi score 2

5). Jawaban E sangat tidak setuju diberi score 1

**DAFTAR PUSTAKA**

Beauchamp dan Bowie. 2002. *Media Akuntansi*, September.

Budi, Sasongko dkk. *Internal Auditor dan Dilema Etika*. Available on-line at

<http://theakuntan.com>.

Herawati, Fahalina. 2007. *Pengaruh Persepsi Profesi dan Kesadaran Etis terhadap Komitmen Profesi Akuntan Publik (Survey pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Surakarta)*. Skripsi. <Http://digilib.unnes.ac.id>

Kusmanandji. 2003*. Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

Ludigdo, Unti. 2007. *Paradoks Etika Akuntan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ludigdo, Unti dan Machfoedz, M. (1999). *Persepsi Akuntan dan Mahasiswa*

*terhadap Etika Bisnis. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol. 2, no. 1. Januari. Pp. 1-19.

Monica, Citra. 2007. *Hubungan Persepsi Auditor Internal atas Kode Etik dengan Efektivitas Pelaksanaan Audit: Survey pada Beberapa Bank di Bandung*.

<Http://dspace.widyatama.ac.id>

Muthmainah, Siti. 2006. *Studi tentang Perbedaan Evaluasi Etis, Intensi Etis*

*(Ethical Intention) dan Orientasi Etis Dilihat dari Gender dan Disiplin Ilmu: Potensi Rekruitmen Staf Profesional Pada Kantor Akuntan Publik*. SNA 9Padang, 23-26 Agustus 2006.

Mutmainah, Siti dan Asy’Ari, Hasyim. 2004. *Studi tentang Pengaruh Gender dan*

*Disiplin Ilmu terhadap Evaluasi Etis (Ethical Evaluation), Tujuan Etis (Ethical Intention) dan Orientasi Etis (Ethical Orientation) dalam Potensi Rekruitmen Staf Profesional pada Kantor Akuntan Publik*. LaporanPenelitian. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Mulyadi. 2002. *Auditing*. Edisi keenam. Jakarta: PT Salemba Emban Patria.

Robbins, Stephen P dan Timothy A. Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*. Edisi

Keduabelas. Terjemahan oleh Diana Angelica. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Rosalina, Santi. 2010. Perbedaan Perilaku Etis Auditor di KAP dalam Etika Profesi berdasarkan *Locus Of Control* dan *Gender.* Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, (Online), (http://ebook.library.perbanas.ac.id*,* diakses 24 Maret 2012).

Sukriah, Ika, dkk. 2009. Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas, dan Kompetensi terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan. *Simposium Nasional Akuntansi XII. 4-6 November, Palembang.*

Thoha, Miftah. 1983. Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya.

Jakarta: CV Rajawali.

Trisnaningsih, Sri. 2007. Independensi Auditor dan Komitmen Organisasi sebagai

Mediasi Pengaruh Pemahaman Good Governance, Gaya Kepemimpinan,

Budaya Organisasi terhadap Kinerja Auditor. *Simposium Nasional*

*Akuntansi X. 26-28 Juli, Makassar*.

Tugiman, Hiro. 1997. *Perkembangan dan Tantangan Internal Auditing di*

*Indonesia*. Bandung: PT Karyaputri Wardhani.